



Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Laporan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, April 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik

D r s . M A K M U R

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19580413 198603 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	7
Tabel II	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang	18
Tabel III	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang	22
Tabel IV	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang	29
Tabel V	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020	35

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, yang memiliki visi: “*Terwujudnya Kualitas Kehidupan yang Demokratis Partisipatif, Harmonis dalam Memberdayakan Masyarakat ber-Bangsa dan ber-Negara*” serta misi:

- Mengembangkan sistem Politik yang Berkedaulatan rakyat, Demokratis dan Transparan.
- Meningkatkan Integrasi, Persatuan dan Kesatuan Pembauran bangsa.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- Menciptakan situasi dan kondisi IPOLEKSOSBUD yang Kondusif.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk penjabaran dari RPJMD dan Renstra Badan Kesbangpol.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah No. 6 Tahun 2007);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda;

- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
- t) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- v) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
- w) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba;
- x) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sampai dengan 2018;
- z) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- aa) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
- bb) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- cc) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
- dd) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- ee) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- ff) Peraturan Menteri Dalam Negeri, 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
- gg) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Infomasi Kemasyarakatan;
- hh) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- ii) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- jj) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;

- kk) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk di jadikan suatu dokumen perencanaan tahunan untuk tahun 2019, dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui APBD kabupaten.
- b) Menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas.
- c) Sebagai wacana dalam menunjang program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tepagt guna
- d) Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap berdaya guna dan berhasil guna sesuai maksud dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 sebagai tolak ukur penyusunan rencana kerja Tahun Anggaran 2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan di identifikasikannya sejumlah celah kinerja (**Performance Gap**) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan Hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2019 dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**, menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang berbasis kepada masyarakat.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, menjelaskan tentang Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sasaran-sasaran yang menjadi indikator dalam penyusunan Renja, Program dan Kegiatan yang akan dintegrasikan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2019.
- Bab IV Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2018 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2019. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu sebagai pedoman dalam penyusunan draf awal rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun anggaran 2019.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi Terhadap Pencapaian Target

Realisasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2017 sebanyak 7 program dan 22 kegiatan

Pada program kegiatan rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur realisasinya mencapai 90,80% dan 64,52%. Adapun kegiatan yang tidak terealisasi adalah kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Kegiatan pengadaan ini tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran pada Badan Kesbangpol.

Kegiatan yang terealisasi pada program peningkatan dan kenyamanan lingkungan terdapat pada kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yaitu sebesar 100% baik dari segi target kinerja maupun target anggaran.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terealisasi pada kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah terealisasi target anggaran dan kinerja sebesar 100% sedangkan pada kegiatan penguatan kerja sama dengan aparat dalam rangka teknik pencegahan tindak kriminal mencapai target kinerja sebesar 100% dan target anggaran sebesar 95,57%.

Pada program pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi FKUB di tingkat kabupaten dan pembinaan Forum kerukunan Umat beragama di tingkat kecamatan serta rapat koodinasi PAKEM terealisasi sebesar 77.07% dan pada kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa terealisasi sebesar 100%. Sedangkan pada program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, kegiatan yang terealisasi terdapat pada kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, seminar talkshow diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan terealisasi baik kinerja maupun anggaran sebesar 100%..

Program pendidikan politik masyarakat, kegiatan yang telah terealisasi di tahun 2017 adalah penyuluhan kepada masyarakat sebesar 100% dan penyusunan administrasi bantuan parpol sebesar 93,33%.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

TABEL I

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2014-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan Jasa Kom.Sumber Daya Air & Listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit 5	3	12	5	41,7	14	22	440
	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	bln 60	36	12	12	100	12	60	100
	Penyediaan Komponem instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	bh 472	250	62	62	100,0	160	472	100
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali 167	91	36	36	100,0	40	167	100
	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kali 1.150	700	150	34	22,7	300	1.034	90
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	bln 60	36	12	12	100,0	12	60	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur								
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	5	2	15	-	-	15	3,40
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	5	-				11	11
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	1	1	1	4	0,80
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	12	2	0,2	14	3,60
	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	5	2	0,4	10	2,80
	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	5	2	11	2	0,2	10	2,80
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
	Pembangunan Pos jaga / Ronda	Pembangunan Pos jaga / Ronda	-	400	35	16	-	-	35	0,09
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelatihan Belanegara	Keg	6	-	2	2	1,00	4	1,00
	Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terpeliharanya Deteksi Dini di TK Kec., Desa/Kel.	Keg	3	-	2	-	-	1	0,33
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
	Peningkatan kerjasama aparat keamanan dlm teknik pencegahan kejahatan	Peningkatan Kerjasama antar anggota KOMINDA	dok	24	12				12	1,00
	Pemeliharaan Kantrantibmas & penc., Tindak Kriminal Lainnya	-	keg	5	6	-	-	-	-	1,20
	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwakarsa di Daerah	Terselenggaranya Sosialisasi dan Seminar Bahaya Narkoba/HIV Aids	keg	14	1	13	13	1,00	-	1,00
		Peningkatan Kerja sama antar FORKOPIMDA	bln	12	-	-	-	-	12	1,00
	Penguatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Kerjasama dengan Instansi terkait (Kominda)	dok	36	24	12	12	1,00	-	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	keg. 4	4	2	4	2	2	10	2,50
	Pening. Toleransi & Kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FKUB Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan	Keg 10	6	3	3	1	1	10	1,00
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Dialog Wawasan Kebangsaan untuk Pemuda	5	0	1	1	1	4	5	1,00
	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	- 7	1	2	5	250	4	10	1,43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FPK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	5	1	2	1	1	2	4	0,80
	Sosialisasi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Ormas	1	-	1	-	-	0	-	-
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan									
	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	- 100	100	-	-	-		100	1,00
	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	- 100	100	-	-	-		100	1,00
	Program Pendidikan Politik Masyarakat									
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan Politik Pemuda	kali 7		3	5	1,67	39	44	6,29
	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Terselenggaranya tertib administrasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Parpol	Parpol 60	33	11	11	1,00	11	55	0,92

Pangkajene Sidenreng, April 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. MAKMUR
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 195804131986031014

B. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap berupa belanja langsung ditahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 2.258.718.278,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.373.151.000,- atau sebesar 95,18%. Tahun 2018 realisasi anggaran untuk belanja langsung per 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 49.293.578 dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.522.269.000,- atau sebesar 1,95%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

REALISASI KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM	KONDISI KEUANGAN BADAN KESBANGPOL			
	TAHUN 2017		TAHUN 2018 (per Triwulan I)	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total Anggaran	2.373.151.000	2.258.718.278	4.045.137.000	423.133.015
A Belanja Tidak langsung:	-	-	1.522.868.000	373.839.437
- Belanja Pegawai			1.522.868.000	373.839.437
B Belanja Langsung	2.373.151.000	2.258.718.278	2.522.269.000	49.293.578
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	550.157.500	499.536.778	447.265.500	49.293.578
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.127.000	52.345.000	80.010.000	-
- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	62.000.000	62.000.000	35.000.000	-
- Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	816.935.000	808.655.000	490.227.000	-
- Pengembangan Wawasan Kebangsaan	288.656.500	266.032.000	102.274.000	-
- Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	262.425.000	262.426.000	321.455.000	-
- Pendidikan Politik Masyarakat	311.850.000	307.723.500	1.046.037.500	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
 1. Sub bidang Kelembagaan
 2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
 1. Sub bidang Pembauran
 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

A. Kepala Badan:

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- 4) mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 7) mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- 8) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- 10) merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 11) merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 12) mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- 13) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- 14) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 15) menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- 16) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 17) menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- 18) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 19) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- 11) Melaksanakan melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- 13) Mengoordinasikan mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;

- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 15) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 16) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 17) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 20) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 21) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Hubungan Antar Lembaga:

Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- 11) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintaha di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kesatuan Bangsa:

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;

- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
- 11) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;

- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap dari tahun 2017 hingga tahun 2018 didasarkan pada indikator Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL II
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Kesbangpol						Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12	12	12	12	12	12	12	3	12	12	
2	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			12	14	13	13	14	14	5	0	13	13	
3	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan			12	12	12	12	12	12	12	3	12	12	
4	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			12	12	12	12	12	12	12	3	12	12	
5	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			62	160	75	75	75	75	62	0	75	75	
6	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			36	40	70	70	70	70	36	0	70	70	
7	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			150	300	200	200	200	200	200	0	200	200	
8	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran			12	12	12	12	12	12	12	3	12	12	
12	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan			15	15	70	70	20	10	0	0	70	70	
13	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan			0	11	15	15	10	10	0	0	15	15	
14	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
15	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			12	14	13	14	14	14	2	0	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
16	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			5	10	10	10	10	10	2	0	10	10	
17	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			11	10	10	12	12	15	2	0	10	12	
21	Pelatihan Belanegara			2	4					2	0	0	0	
22	Terpeliharanya Deteksi Dini di TK Kec., Desa/Kel.			2	1					0	0	0	0	
25	Peningkatan Kerjasama antar anggota KOMINDA			0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Terselenggaranya Sosialisasi dan Seminar Bahaya Narkoba/HIV Aids			13	-					13	0	0	0	
28	Peningkatan Kerja sama antar FORKOPIMDA			0	12	12	12	12	12	0	0	12	12	
29	Terciptanya Kerjasama dengan Instansi terkait (Kominda)			12	-					12	0	0	0	
34	Terselenggaranya Kesadaran Masyarakat Akan Hukum dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa			2	2					4	0	0	0	
35	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FKUB Tk. Kabupaten dan Tk. Kecamatan			3	1	2				3	0	2	0	
38	Terselenggaranya Dialog Wawasan Kebangsaan untuk Pemuda			1	4					1	0	0	0	
39	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan			2	4					5	0	0	0	
40	Terselenggaranya Rapat Koordinasi FPK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan			2	2					1	0	0	0	
41	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang Ormas			1	1	100 org	100 org	100 org	100 org	0	0	100 org	100 org	
48	Terselenggaranya Pendidikan Politik Pemuda			3	39					5	0	0	0	
49	Terselenggaranya tertib administrasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Parpol			11	11	11	11	11	11	11	0	11	11	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- 2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan :
 - Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.
 - Menyebarnya ideologi / faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
 - Meningkatnya radikalisme
 - Intoleransi antar agama
 - Sparatisme dan Terorisme
 - Konflik SARA
 - Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal
 - Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia
 - Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses informasi yang tidak di imbangi kemampuan menangkal atau meng-*conter* informasi negatif tsb.
- 4) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dan rendahnya pemahaman terhadap arti penting orientasi serta visi bersama mengenai integritas bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional.
- 5) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Bermunculnya faham-faham radikal, separatisme dan terorisme untuk mengganggu persatuan dan kesatuan
- 7) Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.
- 8) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum.
- 9) Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dikarenakan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- 10) Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sehingga terjadi Konflik Berlatar Agama, terkait dengan kerukunan, pendirian Rumah Ibadat dan merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan.
- 11) Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
- 12) Penyiapan menghadapi pemilihan umum 2019.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

TABEL III
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Keb. Dana (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib					Urusan Wajib					
	Pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran		504.726	Pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		752.338	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	220 lbr	1.110	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidrap	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	18.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidrap	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 bln	18.900	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	12 bln	10.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=2, R2=10 unit	4.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	R4=3 R2=10 unit	8.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	77.974	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	81.873	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	20.397	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	30.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 bh	3.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	75 bh	5.300	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	5.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Kab. Sidrap	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Kab. Sidrap	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 0	Eks am plar	5.500		
	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman			Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	7700	orn g	175.000		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	68	kali	149.310		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70	kali	166.776	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	181	kali	21.150		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	200	kali	24.208	
	Pelayanan Adm Perkantoran		Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	bln	210.745		Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	bln	221.282	
	Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		82.250	Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			1.227.425		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sidrap	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sidrap	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1	Uni t	400.000		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan	70	bh	100.000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	15	unit	120.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	unit	5.500		Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	unit	300.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=2 R2=9	unit	70.000		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.	R4=3 R2=10	unit	98.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	5 unit	1.750	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sidrap	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	3.675	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	5.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.	10 unit	5.250	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	200.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	28.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	28.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidrap	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		28.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidrap	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 org	28.000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidrap	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Lap	80.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Lap	20.000	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				55.000	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				55.000	
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan bela negara	130 org	55.000	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan bela negara	130 org	55.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				490.227	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				1.044.738	
	Forum Silaturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah koordinasi FORKOPIMDA			Forum Silaturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah koordinasi FORKOPIMDA	12 bln	470.000	
	Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini					Penguatan Kerja Sama Aprat Keamanan dalam Teknik Pencegahan dan Deteksi Dini		Jumlah Laporan KOMINDA	11 dok	122.000	
	Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial		Jumlah peserta sosialisasi			Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial		Jumlah peserta sosialisasi	200 org	75.000	
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		Jumlah tim terpadu penanganan konflik			Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		Jumlah tim terpadu penanganan konflik	11 tim	300.000	
	Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa		Jumlah laporan pemantuan dan pengendalian unjuk rasa			Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa		Jumlah laporan pemantuan dan pengendalian unjuk rasa	5 dok	30.000	
	Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen		Jumlah peserta sosialisasi			Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen		Jumlah peserta sosialisasi	50 org	50.000	
	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah		Jumlah dokumen laporan perkembangan politik di daerah	7 dok	170.409	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah		Jumlah dokumen laporan perkembangan politik di daerah	5 dok	178.929	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahanan tentang P4GN			Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahanan tentang P4GN	100 org	75.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan wawasan Kebangsaan				75.038	Pengembangan wawasan Kebangsaan				322.580	
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa			Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	65 org	25.000	
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Jumlah Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	1 keg	25.000	Rapat Koordinasi FPK Tk. Kabupaten		Jumlah rapat koordinasi FPK	1 keg	25.000	
	Penguatan Tim PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran kepercayaan dan keagamaan di daerah.		Jumlah rapat koordinasi Tim PAKEM	1 kali	29.510	Penguatan Tim PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran kepercayaan dan keagamaan di daerah.		Jumlah rapat koordinasi Tim PAKEM	2 kali	61.971	
	Pembentukan PPWK di Kecamatan		Jumlah Kecamatan yang membentuk PPWK			Pembentukan PPWK di Kecamatan		Jumlah Kecamatan yang membentuk PPWK	11 kec	100.000	
	Peringatan Hari Besar Nasional		Jumlah peringatan hari besar nasional			Peringatan Hari Besar Nasional		Jumlah peringatan hari besar nasional	2 keg.	15.000	
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				65.280	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				871.476	
	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan	290 org	115.000	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Sidrap	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan	290 org	115.000	
	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi			Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi	250 org	125.000	
	Sosialisasi Perpres No. 7 Tahun 2018		Jumlah peserta sosialisasi			Sosialisasi Perpres No. 7 Tahun 2018		Jumlah peserta sosialisasi	330 org	220.000	
	Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah kecamatan yang dibina	11 kec	65.280	Pembinaan Pembauran Kebangsaan		Jumlah kecamatan yang dibina	11 kec	88.238	
	Forum, dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat		Jumlah peserta forum dan dialog peningkatan kesadaran belanegara bagi masyarakat			Forum, dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat		Jumlah peserta forum dan pelatihan peningkatan kesadaran belanegara bagi masyarakat	100 org	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dialog Publik Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Kab. Sidrap	Jumlah peserta dialog publik revitalisasi nilai-nilai pancasila			Dialog Publik Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Kab. Sidrap	Jumlah peserta dialog publik revitalisasi nilai-nilai pancasila	100 org	50.000	
	Pelayanan administrasi Rekomendasi Penelitian dan Rekomendasi Kegiatan		Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan			Pelayanan administrasi Rekomendasi Penelitian dan Rekomendasi Kegiatan		Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	1000 rekome ndasi	15.000	
	Sosialisasi Undang-Undang Ormas		Jumlah peserta sosialisasi			Sosialisasi Undang-Undang Ormas		Jumlah peserta sosialisasi	100 org	50.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas		Jumlah dokumen ormas			Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas		Jumlah dokumen ormas	5 dok	30.000	
	Pengembangan dan Maintenance Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan		Tersedianya Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)			Pengembangan dan Maintenance Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan		Tersedianya Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)	1 keg.	100.000	
	Pendidikan Politik Masyarakat				156.038	Pendidikan Politik Masyarakat				436.900	
	Penyuluhan Kepada masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	130 org	50.000	Penyuluhan Kepada masyarakat	Kab. Sidrap	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	130 org	50.000	
	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah Parpol yang di bina	11 parpol	50.000	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol		Jumlah Parpol yang di bina	11 parpol	50.000	
	Dialog Politik dan Pendidikan Politik		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik			Dialog Politik dan Pendidikan Politik		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	400 org	200.000	
	Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di kab. Sidrap		Jumlah laporan pemetaan dan evaluasi kondisi politik			Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di kab. Sidrap		Jumlah laporan pemetaan dan evaluasi kondisi politik	1 laporan	75.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke dalam rancangan Renja Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap. Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan, di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel IV
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
1.	<u>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</u>					
	Penyuluhan dalam rangka kewaspadaan dini daerah	Panca Rijang,	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang kewaspadaan dini	1 keg.	Usulan Musrembang Kecamatan	
	Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	Panca Lautang Pitu Riawa	Jumlah peserta sosialisasi	1 keg. 2 keg.		
2.	<u>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</u>					
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Panca Rijang, Tellu Limpoe Dua Pitue	Terselenggaranya sosialisasi PG4N bagi masyarakat	1 keg. 1 keg. 1 keg.		
	3.	<u>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</u>				
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		Panca Rijang	Jumlah kecamatan yang dibina	1 keg.		
		Maritengngae		1 keg.		
		Pitu Riawa		2 keg.		
		Tellu Limpoe		1 keg.		
	Dua Pitue	1 keg.				
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	Panca Rijang, Tellu Limpoe Dua Pitue	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi	2 keg. 1 keg. 2 keg.			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kab. Sidrap guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Membantu melaksanakan rencana kerja lebih rasional.
2. Memperjelas rencana kerja sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
3. Menetapkan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang telah dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
4. Mengarahkan Kegiatan yang diprioritaskan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang :

A. Tujuan Badan Kesbang dan Politik

- 1) Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis.
- 2) Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi, penyelesaian permasalahan actual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.

- 4) Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama.
- 5) Terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang penuh kedamaian.

B. Sasaran

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.
- 5) Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.
- 6) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.
- 7) Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.3 Program dan Kegiatan

III.3.1 Program

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan, Program kerja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebanyak 9 (Sembilan) program yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Pendidikan Politik Masyarakat

III.3.2 Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan penjabaran dari Program yang akan dilaksanakan sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan. Rencana kegiatan untuk tahun 2019 sebanyak 57 kegiatan, yaitu:

➤ Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
13. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

➤ Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

➤ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

➤ Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan:
 1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

- Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan:
 1. Forum Silaturahmi FORKOPIMDA bersama Masyarakat.
 2. Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
 3. Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
 4. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 5. Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa.
 6. Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen.
 7. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
 8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat.

- Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan:
 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.
 2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
 3. Penguatan Tim Pakem dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di Daerah.
 4. Pembentukan PPWK di Kecamatan.
 5. Peringatan Hari Besar Nasional.

- Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan:
 1. Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
 2. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
 3. Sosialisasi Perpres No.7 Tahun 20118
 4. Pembinaan Pembauran Kebangsaan
 5. Forum dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara.
 6. Dialog Publik Revitalisasi dan aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
 7. Pelayanan Administrasi Rekomendasi Penelitian dan Rekomendasi Kegiatan
 8. Sosialisasi Undang-Undang Ormas
 9. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas

10. Pengembangan dan Maintenance Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

➤ Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan:

1. Penyuluhan Kepada Masyarakat.
2. Penyusunan Administrasi bantuan Parpol.
3. Dialog Politik dan Pendidikan Politik.
4. Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Kab. Sidrap.

Tabel V
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.05	Urusan Wajib									
	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		%	753.448				791.120	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	Kab. Sidrap	220	Lbr	1.110	APBD II	220	lbr	1.166
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		12	bln	18.900		12	bln	19.845
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah		12	bln	10.000		12	bln	10.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		R4=3, R2=10	unit	8.000		R4=3, R2=10	unit	8.400
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12	bln	81.873		12	bln	85.966
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12	bln	30.000		12	bln	31.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		75	bh	5.300		75	bh	5.565
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan		5	unit	5.500		5	unit	5.775
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1800	Eks mpr	5.500		1800	Eks mpr	5.775
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		7700	orgng	175.000		7700	orgng	183.750
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		70	kali	166.776		70	kali	175.114
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		200	kali	24.208		200	kali	25.418
	Pelayanan Adm Perkantoran	Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12	bln	221.282	12	bln	232.346		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			1.227.425				1.288.796
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kab. Sidrap	1 Unit	400.000		APBD II	1 unit	420.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan		70 buah	100.000			70 buah	105.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		15 unit	120.000			15 unit	126.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 unit	300.000			1 unit	315.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala.		R4=3, R2=10 unit	98.500			R4=3, R2=10 unit	103.425
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	3.675			10 unit	3.859
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala.		10 unit	5.250			10 unit	5.513
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat		1 unit	200.000			1 unit	210.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		%	28.000				29.400
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidrap	4 org	28.000		APBD II	4 org	29.400
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	140.000				105.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidrap	6 Lap	120.000		APBD II	4 Lap	84.000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.		1 Lap	20.000			1 Lap	21.000
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				55.000				55.000
	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Bela Negara	Kab. Sidrap	130 org	55.000		APBD II	130 org	55.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				1.044.738				1.096.975	
	Forum Silaturahmi FORKOPIMDA Bersama Masyarakat	Jumlah koordinasi FORKOPIMDA	Kab. Sidrap	12	bln	470.000	APBD II	12	bln	493.500
	Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	Jumlah Laporan Kewaspadaan Dini		11	lap	122.000		11	lap	128.100
	Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta sosialisasi		200	org	75.000		200	org	78.750
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah tim terpadu penanganan konflik sosial		11	tim	300.000		11	tim	315.000
	Pemantauan dan Pengendalian Unjuk Rasa	Jumlah laporan pemantuan dan pengendalian unjuk rasa		5	dok	30.000		5	dok	31.500
	Sosialisasi Dasar-Dasar Intelijen	Jumlah peserta sosialisasi		50	org	50.000		50	org	52.500
	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan perkembangan politik di daerah		5	dok	178.929		5	dok	187.876
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahanan tentang P4GN		100	org	75.000		100	org	78.750
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				226.971				238.320	
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Sidrap	65	org	25.000	APBD II	65	org	26.250
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Koordinasi Kerukunan Umat Beragama		2	kali	47.804		2	kali	50.195
	Penguatan Tim PAKEM dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan permasalahan aliran kepercayaan dan keagamaan di daerah.	Jumlah rapat koordinasi Tim PAKEM		2	kali	61.971		2	kali	65.070
	Pembentukan PPWK di Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang membentuk PPWK		11	kec	100.000		11	kec	105.000
	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional		2	keg.	15.000		2	keg.	15.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				843.238				885.400		
	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kab. Sidrap	290	org	115.000		APBD II	290	org	120.750
	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi		250	org	125.000			250	org	131.250
	Sosialisasi Perpres No. 7 Tahun 2018	Jumlah peserta sosialisasi		330	org	220.000			330	org	231.000
	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah kecamatan yang dibina		11	kec	88.238			11	kec	92.650
	Forum, dan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta forum dan pelatihan peningkatan kesadaran belanegara		100	org	50.000			100	org	52.500
	Dialoq Publik Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah peserta dialoq publik revitalisasi nilai-nilai pancasila		100	org	50.000			100	org	52.500
	Pelayanan administrasi Rekomendasi Penelitian dan Rekomendasi Kegiatan	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan		1000	reko mend asi	15.000			1000	reko men dasi	15.750
	Sosialisasi Undang-Undang Ormas	Jumlah peserta sosialisasi		100	org	50.000			100	org	52.500
	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Ormas	Jumlah dokumen ormas		5	dok	30.000			5	dok	31.500
	Pengembangan dan Maintenance Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)		1	keg.	100.000			1	keg.	105.000
	Pendidikan Politik Masyarakat				375.000				393.750		
	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik		130	org	50.000			130	org	52.500
	Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol	Jumlah parpol yang di bina		11	par pol	50.000			11	par pol	52.500
	Dialoq Politik dan Pendidikan Politik	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Kab. Sidrap	400	org	200.000		APBD II	400	org	210.000
	Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di kab. Sidrap	Jumlah laporan pemetaan dan evaluasi kondisi politik		1	laporan	75.000			1	laporan	78.750
	J U M L A H T O T A L					4.910.011				5.155.512	

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2019. Rencana Kerja di tahun 2019 terdiri dari 9 program yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan publik/masyarakat.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD Badan Kesbang dan Politik Tahun Anggaran 2019.